Efisiensi Anggaran Era Prabowo: Analisis Kekuasaan dan Kepentingan Elite

Felia Primaresti
Manajer Riset dan Program
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII)



THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

kumparanNEWS

Cari di sini...

News Entertainment Tekno & Sains Bisnis Bola & Sports Otomotif Food & Tr

Breaking News Halal Living 16th SATU Indonesia Awards 2025 Green Initiative Video Story

ICW Kritik Retreat Kepala Daerah: Tak Sesuai Efisiensi Anggaran

kumparanNEWS

18 Februari 2025 16:29 WIB · waktu baca 3 menit

4 3

KOMPAS

Deddy Corbuzier Jadi Stafsus Menhan, Efisiensi Anggaran Dipertanyakan

...us lain oleh Menhan di tengah instruksi ...kan anggaran dipertanyakan.

CNBC INDONESIA

HOME MARKET MY MONEY NEWS TECH LIFESTYLE SHARIA ENTREPRENEUR

DPR Cecar Sri Mulyani, Efisiensi Anggaran Malah Utang 2025 Bertambah

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia

01 July 2025 17:40

TEMPO

Menu Harian Mingguan Tempo Plus

Teroka Seni Buku Arsitektur Obituari Film Sosok

FFI 2025 Diluncurkan di Tengah Efisiensi Anggaran

Rangkaian Festival Film Indonesia atau FFI 2025 resmi bergulir dengan jumlah nominasi 17 di tengah efisiensi anggaran.

1 Juli 2025 | 20.36 WIB

ELSHINTA.COM

Dalam Negeri Luar Negeri Peristiwa Sepakbola Olahraga Hiburan Gaya Hidup IPTEK Perempuan Multimedia Pemilu Nusantara Ekspos

INDORAYA.NEWS

BERITA NASIONAL PERISTIWA POLITIK JATENG SEMARANG RAGAM OPINI KIRIM TULISAN

JATENG

PHRI Keluhkan Okupansi Hotel Anjlok Akibat Efisiensi Anggaran, Begini Tanggapan Pemprov Jateng

By Dickri Tifani · Selasa, 22 Jul 2025 · 60 Views



Efisiensi anggaran berdampak ke berbagai sektor, legislator dorong DIY punya strategi khusus

Dalam Negeri · Editor: Sigit Kurniawan · Selasa, 22 Juli 2025 - 20:51 WIB

Trending

Prabowo cerita soal Menkeu Sri Mulyani yang stres tiap kali dipanggil

21 Juli 2025 WIB

SUARA BANGSA

Tegas Menyampaikan Aspirasi

Cari Berita

HOME NEWS HUKRIM BIROKRASI EKONOMI POLITIK PENDIDIKAN KESEHATAN SOSIAL BUDAYA WI

BEAUTYNESIA.

HOME BEAUTY FASHION LIFE WELLNESS

Influencer Quiz Cerita Yuk Video Stories Foto Video Infografis Indeks

Rabu, 23 Juli 2025 Tambahkan Menu

Home / Daerah

Ditengah Efisiensi Anggaran, DPRD Bojonegoro Beli Mobil Dinas Mewah, Anggaran Capai Rp2,6 Miliar

Home > Life > Be Updates

Di Tengah Efisiensi Anggaran, DPR Rapat Tersembunyi di Hotel Fairmont! Berapa Harga Sewanya?

Rini Apriliani | Beautynesia

Senin, 17 Mar 2025 14:35 WIB

kabarMadura.id

Beranda News Pemerintahan Politik Pendidikan Hukum Sosial Olahraga Pilkada e-Paper

KBR

Inspiratif, Terpercaya

PODCAST INDONESIA BAIK

BERITA SAGA RAGAM ARTIKEL PODCAST OPINI

NASIONAL

Mempertanyakan Efisiensi dan Transparansi Usai Polri Minta Tambah Anggaran Rp 63 T untuk 2026

"Jadi kalau kemudian sekarang minta tambahan lagi Rp 63,7 triliun, efisiensinya itu di mana," tanya Pengamat.

AUTHOR / SISKA MUTAKIN, AURA ANTARI - EDITOR / RESKY NOVIANTO

Rabu 09 Juli 2025 pukul 13.13 WIB

Bacakan Bagikan

Beranda / News

GMNI Sampang Kritik Tidak Beroperasinya Ambulans Laut Akibat Efisiensi Anggaran

Kabar Madura 9 Juli 2025

News

THE INDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Membaca Ulang Inpres 1/2025 di Era Prabowo-Gibran

Konteks Awal dan Kebijakan
Kebijakan awal Presiden Prabowo yaitu Inpres No.1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN & APBD. Instruksi utamanya adalah pembatasan belanja seremonial, studi banding, seminar, dll.

Tujuan Positif dari Efisiensi
Mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran (Yuliafitri, 2024), dan meningkatkan efektivitas belanja negara.

Sisi Lain dari Efisiensi Anggaran
Efisiensi bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, anggaran bisa digunakan sebagai instrumen politik, bukan sekadar teknokratis (Schlogl, 2020).

Keterlibatan Elite dan Bisnis
Rp300 Triliun hasil efisiensi dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan TNI AD, dan investasi lewat Danantara di mana CEO Rosan merangkap Menteri & eks Ketua TKN Prabowo-Gibran.

Potensi Masalah: Oligarki dan Akses Kekuasaan
Keterlibatan elite membuka potensi kebijakan fiskal yang tidak berpihak pada rakyat. Selain itu, potensi penyalahgunaan efisiensi untuk konsolidasi kekuasaan dan jaringan politik-ekonomi.



THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

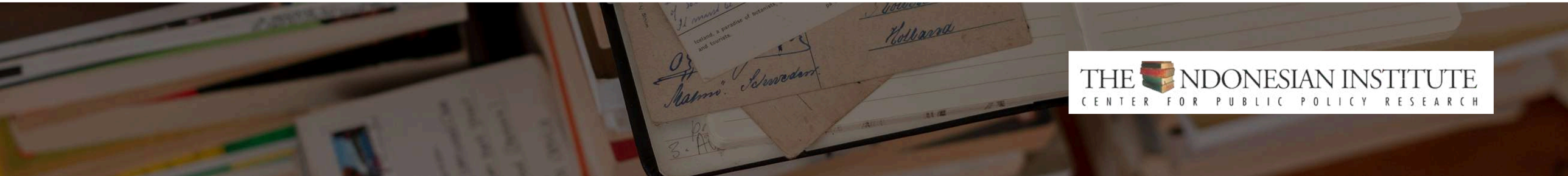
Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana efisiensi anggaran di era Prabowo-Gibran mencerminkan kepentingan politik?
2. Sejauh mana kekuasaan kelompok kepentingan memengaruhi kebijakan fiskal di era Prabowo-Gibran?
3. Apakah distribusi anggaran di pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan pola patronase politik?
4. Bagaimana strategi kebijakan yang optimal untuk pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam konteks efisiensi anggaran?

Metode Penelitian

Metodologi Kualitatif Deskriptif

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis dokumen kebijakan, narasi, dan wawancara mendalam dengan ahli dari UGM dan Kepala Bappeda DIY untuk memahami konteks daerah.



Tinjauan Pustaka

Teori Public Choice: Politik Bukan Netral

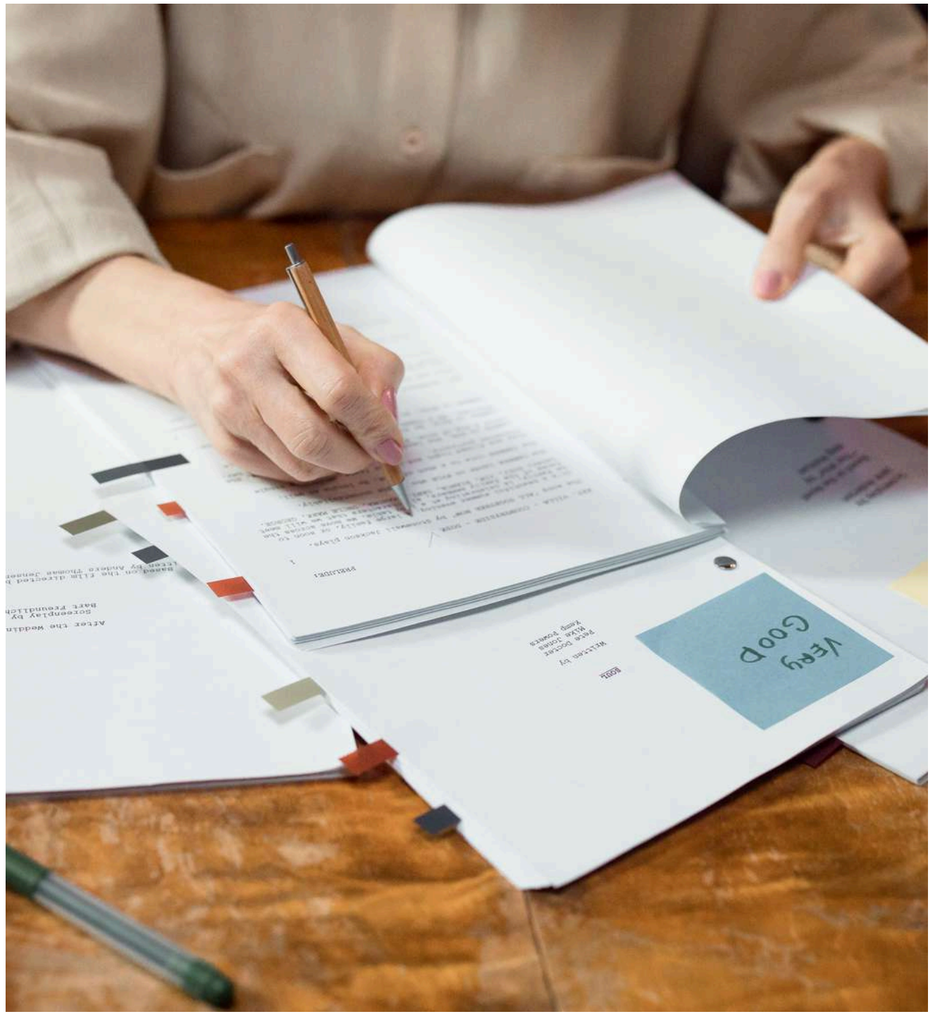
Politisi dan birokrat cenderung bertindak demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, seperti meningkatkan elektabilitas dan kekuatan politik, yang memengaruhi keputusan anggaran, termasuk penyaluran dana ke daerah (Chohan, 2024; Grossman, 1994).

Politik sebagai Strategi Rasional

Pendekatan ekonomi dalam ilmu politik menunjukkan bahwa tindakan aktor politik sering kali dianggap rasional dan efisien dalam konteks situasi yang dihadapi, termasuk penggunaan anggaran untuk "membeli" dukungan politik (Breton, 1993).

Ideal vs Realitas Kebijakan Publik

Meski kebijakan dipengaruhi kepentingan politik, secara hukum setiap keputusan seharusnya tunduk pada prinsip AUPB (Asas Umum Pemerintahan yang Baik) seperti kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan (UU 30/2014).



Refleksi Kepentingan Politik dalam Kebijakan Efisiensi Anggaran

Definisi Efisiensi Kabur, Komunikasi Pemerintah Lemah

- Tidak ada indikator, tujuan, atau batasan jelas dalam Inpres 1/2025.
- Pemerintah gagal menjelaskan dampak pemangkasan secara transparan, akibatnya, publik sulit mengawasi dan muncul ketidakpercayaan.
- Ini bertentangan dengan **asas kepastian hukum dan transparansi** dalam AUPB, karena membuat pelaksanaan tidak bisa diawasi publik secara rasional.
- Dalam perspektif teori kebijakan publik, kebijakan yang **tidak *evidence-based*** cenderung menciptakan ketidakpastian dan ketimpangan dalam implementasi.

Pemangkasan Tidak Merata: Sektor Esensial Tertekan, Lembaga Elite Aman

- Sektor pendidikan tinggi, kesehatan, dan dana ke daerah mengalami pemotongan besar.
- Sebaliknya, anggaran Kemenhan dan Polri justru besar.
- Program seperti KIP-K terganggu, akses pendidikan di daerah 3T terdampak, tunjangan dosen sempat tidak dibayarkan, lembaga peradilan terhambat memproses laporan.
- Ini melanggar **asas keadilan dan asas prioritas kepentingan umum** karena menempatkan keamanan negara di atas hak dasar warga.
- Logika *public choice theory* menjelaskan ini sebagai **upaya pemerintah melayani kepentingan kelompok elit** (polri-tni) ketimbang warga biasa.

Refleksi Kepentingan Politik dalam Kebijakan Efisiensi Anggaran

Tabel 2.1 Sepuluh Kementerian/Lembaga dengan Alokasi Anggaran Tertinggi Tahun 2025

No	Kementerian/Lembaga	Anggaran 2025 (Triliun Rupiah)
1	Badan Gizi Nasional	217,86
2	Kementerian Pertahanan	167,4
3	Kepolisian RI	109, 67
4	Kementerian Kesehatan	104, 35
5	Kementerian Sosial	76,04
6	Kementerian Agama	75,21
7	Kementerian Pekerjaan Umum	70,86
8	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	55,45
9	Kementerian Keuangan	47,13
10	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	33,65

Sumber: Tempo.co (31/5/2025)

Tabel 2.2 11 Program Unggulan Prabowo Subianto Berdasarkan Prioritas (Diurutkan Berdasarkan Program Prioritas)

No	Nama Program	Anggaran (Triliun Rupiah)
1	Makan Bergizi Gratis (MBG)	121,00
2	Program 3 Juta Rumah	41,88
3	Koperasi Desa Merah Putih	200,00
4	Sekolah Rakyat	11,60
5	Sekolah Unggul Garuda	2,00
6	Rehabilitasi Sekolah	19,50
7	Cek Kesehatan Gratis (CKG)	3,40
8	Penuntasan Tuberkulosis	1,50
9	Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas	1,70
10	Lumbung Pangan	23,16
11	Pembangunan Bendungan & Irigasi	20,50

Sumber: CNBC (4/6/2025)

Prioritas Anggaran Berbasis Kepentingan Politik, Bukan Kebutuhan Publik

- Program jumbo seperti Koperasi Merah Putih (Rp200T) dan MBG (Rp121T) dapat alokasi besar, meski belum siap sistemnya, banyak keracunan, dan potensi korupsi.
- Program kesehatan masyarakat seperti penuntasan TBC hanya dapat Rp1,5T.
- Ini menunjukkan prioritas didasarkan pada nilai politik elektoral, bukan urgensi publik.
- Ini mencerminkan politik simbolik di mana **anggaran dijadikan alat pencitraan** dan konsolidasi, bukan pelayanan publik berbasis kebutuhan.
- Secara prinsip AUPB, ini **mengabaikan asas kemanfaatan umum dan profesionalitas.**

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Refleksi Kepentingan Politik dalam Kebijakan Efisiensi Anggaran

Struktur Pemerintahan Boros: Kabinet Gemuk & Jabatan Gimmick

- Jumlah pos kabinet membengkak jadi 109 (menteri, wakil menteri, pejabat setingkat menteri).
- Tidak ada upaya perampingan meski pemerintah menggaungkan efisiensi.
- Penunjukan figur seperti Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Kemenhan menegaskan fleksibilitas anggaran yang tidak akuntabel.
- Bertentangan dengan **asas efisiensi dan efektivitas dalam AUPB** karena **menambah beban fiskal tanpa urgensi institusional yang jelas.**
- Dari kacamata *institutionalism*, ini menunjukkan **lemahnya reformasi kelembagaan dan tingginya kompromi politik** dalam pembentukan struktur pemerintahan.

Efisiensi sebagai Alat Konsolidasi Kekuasaan

- Alokasi anggaran besar ke lembaga keamanan dan program populis menunjukkan strategi memperkuat dukungan politik.
- Rekrutmen TNI besar-besaran untuk fungsi sipil (pertanian, kesehatan) memperluas peran militer dalam ranah publik. Di sisi lain, pemangkasan ke sektor yang rentan dan partisipatif memperlemah kontrol sipil.
- Hal ini sesuai dengan *public choice theory* di mana **efisiensi tidak ditujukan untuk penghematan, tapi untuk memperkuat aliansi kekuasaan** dan meminimalkan gangguan dari kelompok non-loyal.
- Ini **bertentangan dengan asas akuntabilitas dan pemerintahan yang terbuka.**

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Pemetaan Kelompok Kepentingan pada Kebijakan Fiskal Era Prabowo-Gibran

Tabel 2.3 Matriks Pemetaan Kelompok Kepentingan Terhadap Kebijakan Fiskal Era Prabowo–Gibran

Kelompok Kepentingan	Kepentingan Utama	Peran dalam Kebijakan	Bentuk Keuntungan	Tingkat Kedekatan dengan Kekuasaan
Militer (aktif dan purnawirawan)	Ekspansi peran di sektor sipil dan anggaran pertahanan	Pelaksana program MBG, dominasi dalam proyek nasional	Kenaikan anggaran, jabatan sipil, konsolidasi pengaruh politik	Sangat tinggi
Korporasi besar	Akses proyek strategis, konsesi lahan, kontrak besar	Mitra proyek perumahan, *food estate*, dan infrastruktur	Proyek, akses lahan, insentif fiskal	Tinggi
Elite politik	Posisi politik, pengaruh kebijakan, kontrol program	Penentu arah program (*food estate*, perumahan)	Jabatan strategis, legitimasi politik	Sangat tinggi
Mitra asing	Investasi strategis dan pengaruh ekonomi	Pendanaan proyek dan infrastruktur	Keuntungan investasi, pengaruh geopolitik	Menengah-tinggi
Masyarakat sipil	Akses layanan dasar, keadilan sosial	Penerima manfaat, tetapi kurang dilibatkan dalam proses	Bantuan terbatas, tetapi dengan kontrol politik	Sangat rendah
Teknokrat	Tata kelola baik, efektivitas kebijakan publik	Minim dilibatkan dalam desain kebijakan	Terpinggirkan dalam pengambilan keputusan	Rendah

Diolah dari berbagai sumber.

Pemetaan Kelompok Kepentingan pada Kebijakan Fiskal Era Prabowo-Gibran

Pemetaan Kelompok Kepentingan: Konsentrasi Kekuasaan dalam Desain Fiskal

- Tabel 2.3 menunjukkan bahwa kebijakan fiskal era Prabowo didominasi oleh aktor-aktor dengan kedekatan tinggi terhadap kekuasaan, seperti militer, korporasi besar, dan elite politik.
- Militer memperoleh keuntungan melalui ekspansi ke sektor sipil, dominasi proyek MBG, dan peningkatan anggaran pertahanan.
- Korporasi besar terlibat langsung dalam proyek perumahan rakyat, food estate, dan infrastruktur strategis.
- Elite politik memainkan peran sebagai pengarah kebijakan, sekaligus penerima insentif dalam bentuk jabatan strategis dan penguatan legitimasi.

Sebaliknya, aktor seperti masyarakat sipil, teknokrat, dan UMKM terpinggirkan, baik dalam perumusan kebijakan maupun implementasinya. Ini mencerminkan pelanggaran terhadap asas partisipasi, keadilan, dan akuntabilitas dalam AUPB.

Militerisasi dan Dominasi Elitis dalam Proyek Prioritas

- Pelaksanaan proyek besar seperti MBG dan f*ood estate* memperlihatkan konsentrasi kendali di tangan militer dan keluarga politik tertentu.
- MBG dikendalikan TNI (71 dapur lapangan, Rp7 miliar anggaran) dan mitra katering dipilih tanpa tender terbuka.
- Program *food estate* tetap dilanjutkan meski terbukti gagal secara ekologis dan sosial, atas dorongan tokoh politik internal (Hashim Djojohadikusumo).

Fenomena ini menunjukkan proyek nasional telah menjadi sarana distribusi sumber daya secara eksklusif, bertentangan dengan asas efisiensi, transparansi, dan kemanfaatan umum.

Pemetaan Kelompok Kepentingan pada Kebijakan Fiskal Era Prabowo-Gibran

Public-Private Partnership (PPP): Kolaborasi atau Konsolidasi Oligarki?

- Kebijakan perumahan 3 juta unit melibatkan pemain besar seperti Agung Sedayu Group dan investor dari Qatar serta UEA.
- Pendekatan PPP mempercepat pembangunan, tetapi menimbulkan kekhawatiran soal akuntabilitas dan privatisasi kebijakan sosial, serta dominasi elit dan swasta dalam kebijakan tanpa melibatkan elemen masyarakat lain.
- Lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penunjukan mitra menunjukkan bahwa kemitraan ini lebih bersifat transaksional daripada strategis. Himpera mengatakan penyalurannya masih banyak ditalangi oleh Bank.
- UMKM, koperasi sekolah, dan komunitas lokal tidak mendapatkan ruang dalam desain maupun pelaksanaan.

Ini memperlihatkan **bias dalam alokasi fiskal yang berpihak pada aktor modal** dan bukan pada kepentingan publik luas, sehingga **melanggar asas keadilan dan keterbukaan** dalam AUPB.

Patronase dan Konflik Kepentingan dalam Pengambilan Keputusan

- Keterlibatan aktor-aktor dekat kekuasaan, seperti militer dan kerabat presiden, memperlihatkan pola patronase yang sistemik.
- Misalnya, proyek *food estate* tetap dijalankan oleh Hashim (adik Prabowo) meski dikritik luas oleh lembaga nasional dan internasional.
- Relasi kekuasaan juga tampak dalam proyek IKN, di mana konflik dan marginalisasi warga lokal luput dari pertimbangan.

Logika ini sejalan dengan *teori public choice* (Grossman, Breton), yang menjelaskan bahwa **pejabat publik bertindak seperti aktor rasional yang mengejar insentif politik,** bukan kebaikan bersama. Akibatnya, distribusi anggaran menjadi instrumen barter politik dan bukannya alat pemenuhan hak warga.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Pemetaan Kelompok Kepentingan pada Kebijakan Fiskal Era Prabowo-Gibran

Dampak Kebijakan: Oligarki Fiskal dan Peminggiran Masyarakat

- Praktik pelibatan eksklusif aktor kuat dalam proyek strategis menyebabkan pengabaian keselamatan publik (kasus keracunan MBG diredam sebagai deviasi statistik).
- Ketidakadilan fiskal (UMKM tersingkir, masyarakat adat kehilangan akses lahan).
- Privatisasi kebutuhan dasar (perumahan, pangan) di bawah kontrol segelintir aktor.

Dalam konteks AUPB, **hal ini merupakan bentuk maladministrasi kebijakan karena tidak menjamin keadilan sosial, tidak berbasis kebutuhan rakyat, dan melanggar prinsip keefektifan dan efisiensi.**



THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Patronase dalam Kebijakan Fiskal Era Prabowo–Gibran

Pergeseran Politik Fiskal: Dari Populis ke Strategis dan Simbolik

- Pemerintahan Prabowo–Gibran menandai pergeseran dari pendekatan populis Jokowi (bansos, BLT) menuju pendekatan fiskal yang terpusat dan berorientasi keamanan serta simbol ketahanan negara.

Efisiensi Sebagai Selubung Repolitisasi Anggaran

- Narasi efisiensi digunakan untuk merasionalisasi redistribusi fiskal, padahal praktiknya menunjukkan konsentrasi anggaran pada institusi pro-penguasa seperti TNI, Polri, dan lembaga baru seperti BGN.

Konsolidasi Patronase Melalui Struktur Kelembagaan dan Proyek Populis Elitis

- Institusi dan program baru seperti BGN dan MBG yang di dalamnya juga dikelola TNI menunjukkan wajah patronase yang dimodernisasi. Ini menunjukkan bahwa proyek populis bukan lagi untuk pemberdayaan masyarakat, melainkan alat konsolidasi kekuasaan melalui relasi patron-klien yang lebih tersentralisasi dan terkontrol. Praktik ini melanggar asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta memperlihatkan konflik kepentingan yang kasatmata.

Distribusi anggaran antar-kementerian menunjukkan pola siapa yang dianggap strategis dan siapa yang bisa dikorbankan:

- Kemenhan dan Polri mendapat alokasi terbesar, sejalan dengan latar belakang militer Prabowo dan fungsi mereka sebagai pilar kekuasaan. Sementara, Kementerian lain seperti PUPR, Keuangan, dan Pendidikan mengalami pemangkasan signifikan, meskipun memiliki fungsi pelayanan publik utama.

Ini menandakan bahwa **patronase juga bekerja horizontal**, memperkuat lembaga yang loyal dan melemahkan yang tak strategis secara politik.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Kesimpulan

Ketidaktepatan Definisi dan Inkonsistensi Implementasi

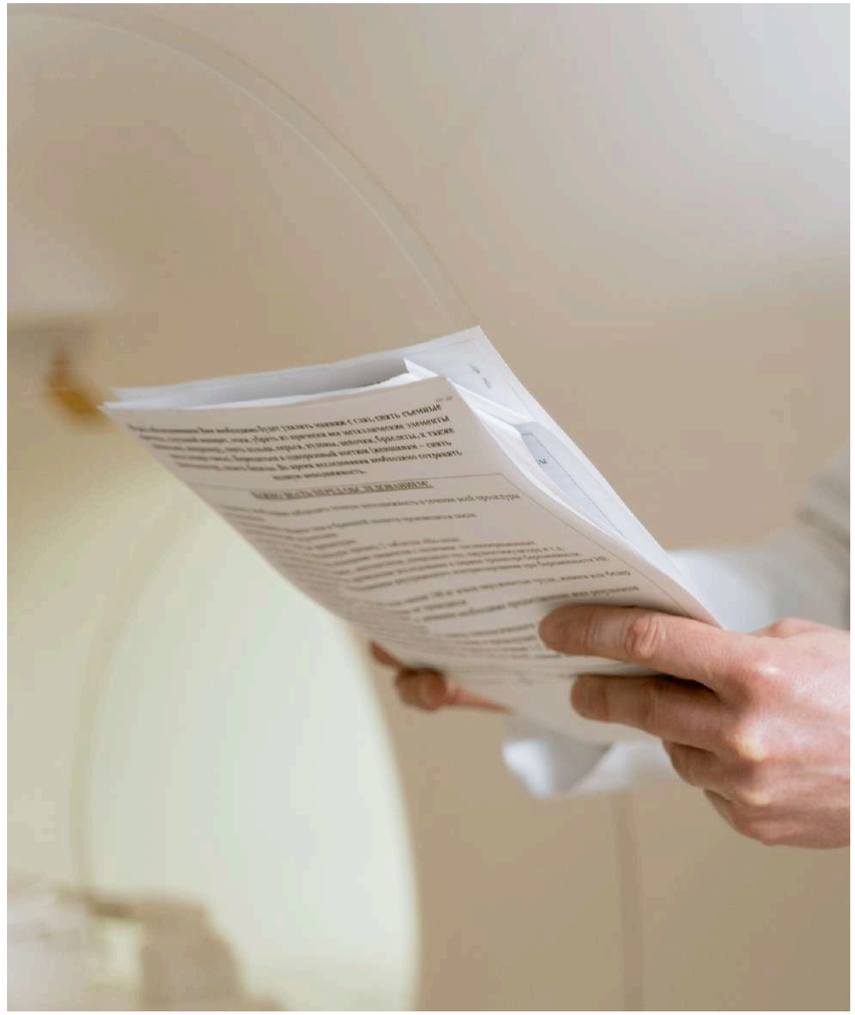
- Kebijakan efisiensi anggaran dalam Inpres 1/2025 tidak memiliki definisi, indikator, maupun tujuan yang jelas. Hal ini membuka ruang penggunaan kebijakan secara lentur dan politis. Inkonsistensi pun tampak, seperti pengangkatan staf khusus di tengah pemotongan tunjangan dosen dan beasiswa, serta pembengkakan struktur kabinet yang justru kontraproduktif terhadap semangat efisiensi.

Politisasi Kebijakan dan Penyimpangan dari Prinsip AUPB

- Alih-alih diarahkan pada optimalisasi kelembagaan dan pelayanan publik seperti di Argentina atau AS, efisiensi anggaran di era Prabowo-Gibran tampak lebih menjadi alat konsolidasi kekuasaan. Dari kacamata teori Public Choice, keputusan anggaran lebih mencerminkan kepentingan aktor politik dominan, bukan kepentingan publik. Secara normatif, kebijakan ini juga melanggar asas keterbukaan, ketidakberpihakan, dan kemanfaatan dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Risiko Beban Publik dan Lemahnya Sensitivitas Sosial

- Tanpa arah yang jelas dan pengawasan ketat, kebijakan ini berisiko justru membebani sektor-sektor publik esensial seperti pendidikan. Minimnya komunikasi publik dan rendahnya analisis dampak sosial menunjukkan kurangnya sensitivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan.



THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Rekomendasi

Transparansi Anggaran Berbasis Data Spasial

- Kemenkeu dan Bappenas perlu menyediakan dashboard terbuka dan real-time yang menampilkan alokasi anggaran secara rinci untuk mencegah patronase dan memperkuat partisipasi publik, sesuai prinsip Open Data.

Revisi Formula Dana Transfer oleh DPR RI

- Komisi XI DPR RI perlu menyesuaikan formula alokasi dana berdasarkan kebutuhan dan kapasitas fiskal riil, bukan pertimbangan politis, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap distribusi anggaran.

Peran BPK dalam Menjaga Netralitas Fiskal

- Presiden perlu mengoptimalkan fungsi BPK untuk memastikan kebijakan anggaran tetap efisien dan berpihak pada kepentingan publik, bukan elite atau kelompok tertentu.



THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

Terima Kasih!

The Indonesian Institute,
Center for Public Policy Research (TII)
Jl. HOS Cokroaminoto No. 92, Menteng
Jakarta Pusat 10310- (021)-315 8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

Twitter : @the_indonesian
Instagram : @indonesian.institute
FB : Tii Jakarta
YouTube : The indonesian institute

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

THE INDONESIAN Forum